

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Collaborative Governance

Gibson (dalam Ikeanyibe, dkk. 2017) telah mengidentifikasi berbagai macam kerangka tata kelola. Penekanan yang dipromosikan oleh masing-masing model bervariasi, tergantung pada lingkungan setempat. Roderick Arthur William Rhodes mendefinisikan tata kelola sebagai "perubahan dalam tata kelola pemerintah yang memiliki makna yang lebih luas, seperti sistem tata kelola yang baru, aturan tata tertib yang berubah, atau cara baru dalam mengatur masyarakat" (Rhodes, 1996). Secara umum, tata kelola dapat dilihat sebagai cara untuk mempertahankan "implementasi kebijakan publik" yang juga memerlukan partisipasi dari pelaku lain, termasuk mereka yang berada di sektor bisnis, dan tidak hanya berfokus pada masyarakat dalam pemerintahan (Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim 2020).

Tata kelola sering digunakan sebagai sinonim untuk "administrasi publik" atau setidaknya sering digunakan sebagai referensi untuk sinonimnya (Lan dan Rosenbloom, 1992; Peters dan Savoie, 1995; Salamon, 1989). Menurut Ansell & Gash *collaborative governance* mengatur beberapa organisasi publik yang menyatukan para pelaku non-pemerintah untuk membuat pilihan yang terinformasi dan resmi, membuat perjanjian kolektif untuk membuat kebijakan publik, dan mengawasi kegiatan publik (Rahayu, Mahsyar, and Fatmawati 2024). Meskipun pandangan ini dianut secara luas, penting untuk menyadari bahwa "tata kelola" adalah

kata ganti untuk "pemerintah" dan bukan sinonim. Karena kesulitan dan masalah yang dihadapi, proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya menjadi lebih rumit, itulah sebabnya tata kelola menekankan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses tersebut (Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim 2020).

Pemerintah, seperti halnya negara, adalah struktur yang mengendalikan atau mengawasi warga negaranya. Hal ini mengarah pada *E-Government*, yang merupakan istilah untuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam administrasi publik untuk meningkatkan pemberian layanan, efisiensi, dan transparansi. Selain itu, teknologi ini telah digunakan secara luas di dunia nyata. Untuk memastikan bahwa masyarakat menerima informasi yang benar dan dapat dipercaya, mematuhi rekomendasi, dan menghentikan penyebaran informasi palsu, komunikasi pemerintah sangat penting (Li and Yan 2024).

Tata kelola pemerintahan yang baik diartikan sebagai “kegiatan lembaga pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara” (Sadjijono 2007). Sebaliknya, “bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber daya dalam pembangunan” adalah apa yang didefinisikan oleh IAN & BPKP (2005) sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik diartikan sebagai “pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 (Riska Chyntia Dewi and Suparno Suparno 2022).

Melalui kolaborasi, mereka memiliki akses terhadap sumber daya lembaga pemerintah yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah publik yang sering muncul di sekitar mereka. Kemitraan pemerintah dengan organisasi non-pemerintah dapat dikategorikan ke dalam tiga arena kemitraan yang berbeda yaitu kolaborasi internal pemerintah-ke-pemerintah, kolaborasi pemerintah-bisnis, dan kolaborasi pemerintah-masyarakat sipil. Departemen pemerintah yang berkonsentrasi pada satu sektor dan lembaga pemerintah yang mengelola layanan publik secara bersama-sama (lintas sektor) merupakan contoh kolaborasi antar lembaga pemerintah (internal) dalam penyelesaian masalah. Hal ini disebabkan oleh perlunya keterlibatan lembaga (Diviani, Fiordelli, and Rubinelli 2024).

Menurut Brennan (1997), kemitraan dicirikan oleh adanya saling ketergantungan antara dua pihak. Berbagai pakar memiliki pendapat yang berbeda tentang gagasan kemitraan. Scott dan Westbrook (1991), misalnya, melihat kemitraan sebagai suatu kesepakatan, saling ketergantungan, dan kepercayaan; Webster (1992) melihatnya sebagai saling ketergantungan dan kepercayaan; Stuart (1993) melihatnya sebagai sesuatu yang bersifat jangka panjang dan saling bergantung (Kerti Yasa 2017).

Kemitraan, menurut Graham dkk. (1994), bersifat konsensual, jangka panjang, berbagi informasi, berbagi risiko, dan berbagi ketidakseimbangan. Kemitraan

dipandang oleh Brennan (1997) sebagai jenis saling ketergantungan, Saxton (1997) sebagai pertukaran sumber daya dan nilai dari akses ke sumber daya, Ellram dan Hendrick (1995) sebagai komitmen, berbagi informasi, berbagi risiko, dan berbagi ketidakseimbangan, dan Gentry (1996) sebagai komitmen, berfokus pada perbaikan berkelanjutan, pandangan jangka panjang, berbagi informasi, berbagi risiko, dan berbagi ketidakseimbangan (Kerti Yasa 2017).

Jika kemitraan tidak muncul dengan sendirinya atau menjadi lebih umum, pejabat dapat mencoba memengaruhi pertumbuhannya. Pembuat kebijakan dapat mempromosikan pembentukan kemitraan dengan sejumlah cara, seperti dengan menerapkan hukuman standar tata kelola bertingkat dan langkah-langkah dukungan. Strategi tertentu bertujuan untuk mengubah atau memengaruhi keuntungan dan kerugian kerja sama untuk satu atau lebih pihak, sementara strategi lain berfokus pada fase ketika pihak-pihak membahas kemungkinan pengaturan kemitraan. Baik tingkat penerapan kebijakan dan inisiatif pemerintah untuk mempromosikan pembentukan kemitraan maupun metode yang mereka gunakan untuk melakukannya berbeda-beda. Sejumlah langkah telah dilakukan oleh pemerintah tertentu, sementara yang lain belum berbuat banyak untuk mempromosikan pembentukan kemitraan (Milman, Ashjian James, and Macuch 2023).

Sementara para peneliti awal meneliti jaringan organisasi di korporasi, nirlaba, dan administrasi publik (misalnya, Fama dan Jensen, 1983, Provan, 1980), penelitian tata kelola jaringan khusus kemudian muncul, dengan fokus pada kemitraan publik-

swasta (Hill & Lynn, 2005) dan kewirausahaan regional (Knox & Arshed, 2022). Tata kelola jaringan adalah pendekatan berbeda yang berpusat pada sekelompok aktor lintas sektor yang saling terhubung secara longgar yang berinteraksi untuk mengatasi masalah dengan komitmen bersama tetapi tanpa mengikuti proses yang ditentukan. Kontribusi Provan dan Kenis tahun 2008 melihat jaringan sebagai bentuk tata kelola dan jaringan secara keseluruhan sebagai unit studi, bukan hanya satu simpul jaringan dan koneksinya (Müller 2024).

Salah satu aktivitas yang pada dasarnya terlihat dalam administrasi jaringan sosial adalah kolaborasi. Hubungan antara simpul komunikasi para pemangku kepentingan membentuk jaringan sosial. Berdasarkan pengetahuan ini, dapat dikatakan bahwa teori kerja sama menganalisis proses tata kelola dari sudut pandang jaringan sosial. Semua pemangku kepentingan harus berpartisipasi dalam diskusi di mana mereka mewakili diri mereka sendiri dan menyuarakan pandangan mereka, menurut paradigma tata kelola kolaboratif. (Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim 2020). Saling ketergantungan dan kepercayaan diperlukan agar partisipasi dapat terjadi, yang pada gilirannya bergantung pada adanya minat dan kesempatan untuk mengekspresikannya. Tujuan kerja sama melalui diskusi dan keterlibatan adalah untuk menciptakan konteks (Sufianti et al. 2013).

O'Leary dan Bingham (Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim 2020) mendefinisikan kolaborasi sebagai tindakan memfasilitasi dan melaksanakan keterlibatan beberapa organisasi untuk mengatasi tantangan yang sulit atau tidak

mungkin ditangani oleh satu organisasi sendiri. Bardach, yang mendefinisikan kerja sama sebagai semacam tindakan kooperatif oleh dua atau lebih lembaga yang bekerja sama dengan tujuan menghasilkan "nilai publik" daripada bekerja sendiri, mendukung sudut pandang ini.

Hal ini menunjukkan bagaimana kolaborasi merupakan teknik dan pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan kerja sama di antara para peserta dalam proses pengambilan keputusan. Bekerja bersama memungkinkan tim untuk bereaksi terhadap isu-isu publik yang terlalu besar untuk ditangani sendiri. Bekerja bersama dapat menghasilkan ide-ide yang lebih kreatif dan inventif, lebih banyak kesetaraan dan partisipasi di antara para pihak, risiko yang lebih rendah, hasil yang lebih sukses, dan kemampuan untuk mencapai lebih banyak dengan lebih sedikit sumber daya dengan menyatukan sumber daya dan mengurangi pemborosan (Abdul sabaruddin, Adnan, and Maulid 2024).

Literatur administrasi publik telah lama mengakui pentingnya tata kelola jaringan, atau manajemen jaringan, bagi kemakmuran sistem pemberian layanan. Tata kelola bersama, tata kelola organisasi induk, dan tata kelola organisasi administratif adalah tiga jenis utama tata kelola jaringan yang umum diakui. Masing-masing jenis tata kelola jaringan ini memiliki kebutuhan khusus berkenaan dengan struktur jaringan dan peran yang dimainkan oleh organisasi-organisasi utama di dalamnya. Setidaknya secara tidak langsung, studi tentang tata kelola jaringan sering kali membuat asumsi bahwa organisasi yang beroperasi dalam suatu jaringan menyadari

tata kelola jaringan dan bahwa tindakan mereka dimotivasi oleh struktur jaringan dan posisi relatif mereka di dalamnya. Meskipun demikian, penelitian tentang jaringan menunjukkan bahwa sering kali ada ketidaksesuaian antara kesan yang sebenarnya ada dan hubungan serta posisi pihak ketiga seperti yang dilihat oleh anggota jaringan (Blanken et al. 2023).

Studi literature menurut (Ngambut 2023) menjadi dasar bagi model tata kelola kolaboratif yang dikembangkan Ansell dan Gash dalam jurnal *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Temuan studi ini dijelaskan oleh empat faktor utama yaitu :

A. Kondisi Awal

Sebelum proses kolaborasi dimulai, ada sejumlah faktor yang dapat membantu atau merugikan kerja sama para pemangku kepentingan serta kerja sama antara lembaga dan organisasi. Terdapat 3 variabel besar kondisi diawal ini antara lain :

- a) Ketidakseimbangan antara kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan pemangku kepentingan. Gangguan ini sering kali menimbulkan masalah saat bekerja sama. Stratifikasi dan manipulasi kekuasaan dapat terjadi karena satu pihak memiliki lebih banyak sumber daya atau wewenang daripada pihak lain, sehingga pihak yang lebih kuat dapat mengendalikan proses kerja sama (Dwi Poetra 2019).
- b) Sejarah di masa lalu yang terjadi baik berupa kerjasama atau konflik yang pernah terjadi diantara pemangku kepentingan. Contoh kolaborasi atau

ketidaksetujuan sebelumnya di antara para pemangku kepentingan dapat menjadi katalisator atau penghambat kerja sama di masa mendatang. Rekam jejak kolaborasi yang produktif dapat menumbuhkan rasa percaya dan mendorong lebih banyak kerja sama. Di sisi lain, perselisihan di masa lalu dapat menyebabkan stres dan ekspektasi yang tidak realistis terhadap proses kolaboratif (Dwi Poetra 2019).

- c) Bentuk dorongan dan kendala dalam kolaborasi. Salah satu elemen kunci keterlibatan pemangku kepentingan dalam kerja sama adalah insentif untuk berpartisipasi. Kebutuhan untuk mencapai tujuan bersama yang tidak dapat dicapai sendiri juga dapat berdampak pada insentif ini, yang mungkin bersifat opsional (Dwi Poetra 2019).

B. Desain Kelembagaan

Mendesain sebuah lembaga, hal ini penting karena menetapkan validitas prosedural dari proses kolaboratif dan terkait dengan pedoman fundamental. Desain kelembagaan menekankan hal ini yaitu a) bagaimana aturan main dalam ikut berpartisipasi dalam kolaborasi, b) bagaimana forum yang dibentuk, c) bentuk aturan pelaksanaan yang jelas, dan d) bagaimana adanya transparansi dalam proses pelaksanaan kolaborasi (Priono and Rusli 2023).

C. Kepemimpinan

Biasanya ada keinginan kuat bagi para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi, sangat mungkin akan ada tingkat konflik atau kesepakatan yang tinggi serta ketidakpercayaan di antara mereka. Dalam situasi ini, kepemimpinan yang kredibel yang dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan diperlukan sebagai mediator dalam kolaborasi. Kepemimpinan yang kuat sangat penting agar kerja sama dapat berkembang karena akan meningkatkan kemungkinan bahwa semua pemangku kepentingan akan menghormati dan memercayai Anda. Kelompok pemangku kepentingan itu sendiri sering kali memberikan kepemimpinan yang kuat ini. Kepemimpinan yang berhasil memiliki sifat inklusif yaitu a) mempunyai tujuan, b) memiliki motivasi, c) dapat mengetahui cara mencapai tujuan, dan d) memiliki rasa empati (Nurwahidah et al. 2024).

D. Proses Kolaboratif

Ansell dan Gash (Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim 2020) mengidentifikasi fase pertama dari proses kolaboratif merupakan tantangan tersendiri. Proses kolaboratif terdiri dari 5 indikator yaitu :

- a) Dialog tatap muka

Semua tata kelola kolaboratif didasarkan pada "dialog pemangku kepentingan." Wacana ini adalah proses yang difokuskan pada konteks dan kesepakatan yang menjadi dasar munculnya wacana tersebut. Keterlibatan pemangku kepentingan ini sering dilakukan untuk menemukan kemungkinan dengan menyajikan narasi bahwa

kolaborasi akan memberikan hasil yang "saling menguntungkan" bagi para pemangku kepentingan (Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim 2020).

b) Membangun kepercayaan

Membangun kepercayaan terkait erat dengan proses wacana. Pemimpin yang kolaboratif harus menumbuhkan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Membangun kepercayaan adalah usaha yang berlarut-larut yang membutuhkan waktu dan dedikasi yang besar (Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim 2020).

c) Komitmen dalam proses kolaborasi

Tingkat ketergantungan yang signifikan di antara para pemangku kepentingan kemungkinan akan meningkatkan komitmen untuk berkolaborasi. Kolaborasi harus dilihat sebagai proses berkelanjutan dari upaya kerja sama yang saling menguntungkan dan timbal balik, bukan sekadar kesepakatan tunggal (Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim 2020).

d) Pemahaman bersama

Pada suatu titik, para pemangku kepentingan harus menumbuhkan pemahaman kolektif tentang tujuan yang dapat dicapai. Pemahaman bersama ini dapat terwujud sebagai tujuan bersama yang jelas, penggambaran yang tepat tentang tantangan yang dihadapi bersama, dan pengakuan bersama tentang manfaat yang akan diperoleh melalui kolaborasi (Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim 2020).

e) Hasil antara

Bila tujuan dan keuntungan dari proses kolaborasi dapat diamati, meskipun hanya berupa hasil sementara yang kecil, kerja sama cenderung akan terus berlanjut. Dengan para pemangku kepentingan, hasil-hasil kecil ini (kemenangan-kemenangan kecil) dapat berfungsi sebagai katalisator untuk menumbuhkan komitmen dan kepercayaan (Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim 2020).

2.2 Faktor Penghambat *Collaborative Governance*

Proses pengelolaan dan pengaturan struktur sosial, ekonomi, atau organisasi rumit lainnya disebut tata kelola oleh Frederickson. Sebaliknya, dari sudut pandang fungsional, tata kelola dipandang sebagai proses yang digunakan pemerintah untuk mengatur kekuasaan dan kewenangannya guna mengelola kegiatan pemerintah secara umum dan pertumbuhan ekonomi secara khusus. Teori tata kelola bertujuan untuk memahami bidang-bidang transdisipliner yang berawal dari ilmu politik, administrasi publik, sosiologi, ekonomi, dan hukum (Muhammadiyah 2013). Sangat menarik untuk mempelajari bagaimana pemerintah, sebagai aktor negara, menggunakan pemain non-negara seperti sektor bisnis dan masyarakat sebagai alat untuk membuat kebijakan publik yang dikembangkan secara kolaboratif (Muhammad Noor, S.Sos., M.A.P. Dr. Falih Suaedi, Drs., M.Si Dr. Antun Mardiyanta, Drs. and Editor: 2022).

Ansell dan Gash berpendapat bahwa proses koordinasi yang memengaruhi pilihan dan tindakan setiap pelaku di pasar, pemerintah, dan masyarakat sipil disebut

sebagai tata kelola. Kerja sama adalah upaya untuk mencapai tujuan bersama melalui upaya yang saling menguntungkan. Akibatnya, jenis tata kelola yang dikenal sebagai tata kelola kolaboratif melibatkan banyak pihak, termasuk pemangku kepentingan, yang bekerja sama untuk menemukan solusi atas berbagai masalah. Tata kelola kolaboratif tidak hanya mencakup kolaborasi tetapi juga kemitraan antara pelaku di berbagai tingkatan, termasuk organisasi formal, keterlibatan swasta dalam pengambilan keputusan, inisiatif publik, pencarian konsensus, dan perdebatan tentang penerapan kebijakan dan masalah publik. Setiap pelaku ekonomi dalam tata kelola kolaboratif dapat, dengan menggunakan rasionalitas bersama, menyarankan tindakan yang dapat dilaksanakan dalam proses pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah dalam dinamika inovasi terbuka (Bae and Choi 2024).

Tata kelola kolaboratif adalah proses pengelolaan kebijakan publik dan pengambilan keputusan dengan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. (Emerson, Nabatchi, and Balogh 2012). Dedikasi perusahaan sosial untuk menjalankan dan menciptakan strategi inovasi terbuka melalui tata kelola kolaboratif sangat penting bagi keberhasilan mereka. Contoh studi kasus tentang tata kelola kolaboratif adalah pemeriksaan ekonomi berbagi untuk inovasi dalam industri berbagi sepeda di Tiongkok. Melalui penyelarasan kepentingan dan sudut pandang pemangku kepentingan, tata kelola kolaboratif digunakan untuk mengatasi berbagai masalah ekonomi yang rumit (Bae and Choi 2024).

Berdasarkan *Government of Canada* (Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim 2020) terhambatnya kolaborasi maupun partisipasi adalah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

A. Faktor Budaya

Kolaborasi bisa gagal karena adanya alasan yaitu a) kecenderungan budaya ketergantungan pada prosedur dan b) tidak berani mengambil terobosan dan risiko. Kerja sama yang efektif mengharuskan pejabat publik dan para pemimpinnya memiliki kemampuan dan kecenderungan untuk membentuk aliansi dengan cara yang praktis dan dengan memperhatikan hasil. Tidak apa-apa untuk menentang tradisi dan menjadikan semuanya sebagai proses kolaboratif, tetapi hal ini tidak mungkin terjadi di sektor publik yang menghindari risiko dan bergantung pada *protocol* (Dwi Poetra 2019).

Ketika para pemangku kepentingan kreatif dan mampu membangun koneksi dengan cepat untuk mencapai tujuan, kemitraan menjadi tolok ukur. Ketergantungan yang berlebihan pada metode atau proses yang sudah ketinggalan zaman menghambat dan menghambat upaya untuk meningkatkan kualitas kerja sama. Kegagalan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti berpegang pada pendekatan *top-down* untuk memecahkan masalah, memiliki terlalu banyak tanggung jawab pemerintah, dan melanggar kesepakatan berdasarkan sudut pandang bersama (Dwi Poetra 2019).

Selain itu, kerja sama gagal karena keterlibatan kelompok kepentingan atau pemangku kepentingan lainnya sering dianggap berlebihan, tidak relevan, dan dikendalikan oleh pemerintah atau pihak-pihak yang dominan dengan menggunakan strategi dari atas ke bawah. Kolaborasi juga dapat gagal karena penerapan pendekatan yang terpecah-pecah, yang mengabaikan organisasi-organisasi dengan ide-ide antipemerintah sambil melayani kebutuhan partai-partai propemerintah.

B. Faktor Institusi

Kolaborasi bisa karena adanya unsur yaitu a) kecenderungan institusi- institusi yang terlibat dalam kerja sama cenderung menerapkan struktur hierarkis terhadap institusi-institusi lain yang ikut terlibat dalam kerja sama atau kolaborasi tersebut. b) Institusi-institusi yang masih terlalu ketat mengadopsi struktur vertikal, akuntabilitas instansi dan arah kebijakannya juga bersifat vertical. Dalam berinteraksi dengan pihak-pihak lain yang terlibat, pemerintah yang terlibat dalam kerja sama sering kali menggunakan struktur hierarkis. Tidak tepat untuk melakukan kerja sama yang merupakan hubungan antara pemerintah dan nonpemerintah, ketika pemerintah atau pihak yang melakukannya memiliki kewenangan dan kekuatan terkait dengan struktur vertikal, tanggung jawab lembaga, dan kebijakannya yang saling tegak lurus (Dwi Poetra 2019).

C. Faktor Politik

Kolaborasi bisa gagal karena kurangnya inovasi para pemimpin dalam mencapai tujuan (Anas and Abdullah, 2021). Oleh karena itu, memiliki pemimpin yang kreatif atau berwawasan ke depan yang dapat memberikan tipologi nilai dan tujuan yang dapat dijadikan landasan kerja sama dan memberikan contoh agenda atau kegiatan yang akan diterima guna mencapai hasil yang menguntungkan menjadi sangat penting. Kerja sama menjadi terhambat karena pemimpin yang terlibat kurang kreatif atau kurang berhasil dalam mencapai tujuan politik yang merugikan pihak lain (Dwi Poetra 2019).

2.3 Pencegahan *Stunting*

Kekurangan nutrisi dan mineral lainnya mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan, yang merupakan bentuk kekurangan gizi kronis atau jangka panjang. Biasanya terjadi antara pembuahan dan usia 24 bulan, pengerdilan merupakan tanda kekurangan gizi kronis dan terkait dengan penurunan jangka panjang dalam hasil ekonomi orang dewasa, perkembangan saraf, prestasi pendidikan, dan kelangsungan hidup anak (Gough et al. 2024). Pada anak-anak, terhambatnya pertumbuhan dianggap sebagai tanda utama kekurangan gizi. Kekurangan gizi pada anak-anak merusak sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko kematian anak akibat penyakit umum termasuk malaria, pneumonia, dan diare. Keterlambatan perkembangan motorik, gangguan kognitif, prestasi akademik yang buruk, dan berkurangnya kemampuan untuk mencari nafkah saat dewasa merupakan dampak buruk lainnya (UNICEF 2014).

Malnutrisi kronis atau jangka panjang yang dikenal sebagai *stunting* disebabkan oleh defisit mineral dan nutrisi lainnya. Sejumlah ukuran *antropometri* dapat digunakan untuk menentukan nutrisi anak dengan mengacu pada spesifikasi pertumbuhan WHO. Yang pertama adalah *stunting* (tinggi badan terhadap usia), yang menunjukkan malnutrisi kronis atau jangka panjang; yang kedua adalah *wasting* (berat badan terhadap tinggi badan), yang menunjukkan malnutrisi akut; dan yang ketiga adalah *underweight* (berat badan terhadap usia), yang dapat menunjukkan keduanya (Gaston, Ramroop, and Habyarimana 2024).

Skor Z berat badan terhadap tinggi badan (WHZ), berat badan terhadap usia (WAZ), dan tinggi badan terhadap usia (HAZ) digunakan untuk menentukan status gizi. Anak di bawah lima tahun yang mengalami *stunting*, *wasting*, atau *underweight* didefinisikan sebagai mereka yang kadar HAZ, WAZ, atau WHZ-nya kurang dari minus dua standar *deviasi* (<-2 SD). Lebih jauh lagi, anak-anak yang memiliki skor Z di bawah tiga standar *deviasi* (<-3 SD) dikategorikan sebagai *underweight*, *wasted*, atau *stunting* (Gaston et al. 2024). Penyebab *stunting* sangat beragam menurut (Siswati, 2018) faktor utama dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

A. Faktor Genetik

Tinggi badan orang tua sendiri sebetulnya juga dipengaruhi oleh berbagai macam variabel, baik yang bersifat eksternal seperti sakit dan asupan makanan di usia dini, maupun yang bersifat internal seperti genetika. Pengaruh eksternal adalah pengaruh yang dapat diubah, sedangkan pengaruh genetik adalah pengaruh yang tidak

dapat diubah. Oleh karena itu, sulit untuk mengatasi *stunting* pada anak atau keturunannya jika sang ayah bertubuh pendek karena adanya gen dalam kromosomnya yang mengandung sifat bertubuh pendek dan gen tersebut diwariskan kepada keturunannya. Namun, tinggi badan anak tidak boleh terpengaruh jika sang ayah bertubuh pendek karena faktor penyakit atau gizi yang kurang sejak dini. Tubuh anak yang tinggi mungkin masih dimiliki oleh balita (Dwidyaniti Wira 2022).

Prevalensi *stunting* pada anak menurut beberapa penelitian sangat dipengaruhi oleh tinggi badan orang tua. Salah satu penelitian yang dilakukan di Kota Semarang pada tahun 2011 dan dimuat dalam buku *Epidemiologi Stunting* karya dr. Aryu tahun 2020 menemukan bahwa bayi usia satu sampai dua tahun yang memiliki ibu pendek (kurang dari 150 cm) berisiko mengalami *stunting*. Ibu yang bertubuh pendek memiliki risiko 2,34 kali lebih besar untuk melahirkan anak *stunting* dibandingkan ibu yang memiliki tinggi badan normal. Anak usia 1-2 tahun berisiko mengalami *stunting* jika ayahnya bertubuh pendek (kurang dari 162 cm). Ayah yang bertubuh lebih pendek dari rata-rata memiliki risiko 2,88 kali lebih besar untuk melahirkan anak *stunting* (Dwidyaniti Wira 2022).

B. Status Ekonomi

Pendapatan yang rendah dapat diartikan sebagai daya beli yang rendah, yang pada gilirannya membatasi kemampuan seseorang untuk membeli makanan bergizi. Meskipun anak-anak membutuhkan nutrisi yang lengkap untuk tumbuh kembang, kebutuhan nutrisi mereka tidak terpenuhi jika mereka mengonsumsi makanan yang

kualitas dan kuantitasnya buruk. Namun, ketidakmampuan keluarga untuk membeli makanan yang sehat akan menyulitkan pemberian makanan kepada balita, yang dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan atau kekurangan gizi (Dwidyaniti Wira 2022).

C. Jarak Kelahiran

Risiko terjadinya *stunting* 1,38 kali lebih besar pada ibu yang anaknya lahir dengan jarak kurang dari 24 bulan dari kelahiran sebelumnya dibandingkan pada ibu yang anaknya lahir dengan jarak lebih dari 24 bulan (Abeway et al., 2018). Warnayana (2010) menegaskan bahwa anak di bawah usia dua tahun memerlukan perhatian lebih karena pertumbuhan dan perkembangannya terjadi sangat cepat antara usia 0 dan 59 bulan. Pada masa ini, seorang ibu akan memerlukan gizi yang lebih bermutu karena balita sangat rentan terhadap masalah gizi jika kebutuhan gizinya tidak terpenuhi. Kekurangan gizi yang berkelanjutan akan mengakibatkan terjadinya *stunting* jika tidak segera ditangani dengan tepat (Noeraini et al. 2023).

Jarak kehamilan yang terlalu rapat tidak hanya tidak sehat, tetapi juga dapat membahayakan ibu dan bayi yang dikandungnya. Kondisi fisik yang buruk setelah melahirkan dan waktu serta perhatian yang dibutuhkan untuk merawat bayi baru lahir dapat membahayakan kesehatan ibu. Ibu hamil yang tidak sehat akan melahirkan masalah pada janin, dan masalah pada rahim juga akan menghambat pertumbuhan bayi, yang akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan.

D. Riwayat Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Kelahiran dengan berat badan kurang menunjukkan kelaparan akut, tetapi berat badan lahir rendah menunjukkan bayi kelaparan di dalam rahim. Malnutrisi yang berkepanjangan merupakan penyebab utama terhambatnya pertumbuhan. Bayi yang berat badannya kurang dari 2.500 gram dapat lahir dengan panjang tubuh normal. Oleh karena itu, terhambatnya pertumbuhan merupakan masalah bagi anak-anak yang lahir dengan berat badan kurang atau yang telah kekurangan berat badan sejak lahir (Dewi and Widari 2018).

Stunting lebih kecil kemungkinannya terjadi jika kekurangan gizi segera diatasi. *Mortalitas, morbiditas janin, neonatal, kelainan pertumbuhan, perkembangan kognitif yang tertunda, dan penyakit kronis di kemudian hari semuanya terkait dengan BBLR.* Gizi ibu yang buruk dan tingkat infeksi yang lebih tinggi di negara-negara miskin membuat bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) lebih rentan terhadap *retardasi* pertumbuhan *intrauterin* daripada bayi di negara-negara kaya. Anak-anak dengan berat badan lahir rendah 5,7 kali lebih mungkin menderita *stunting* daripada anak-anak dengan berat badan lahir normal, menurut temuan Saadong (Dewi and Widari 2018).

E. Asupan Kalsium

Tulang sebagian besar tersusun atas kalsium. Sementara pada orang dewasa, kekurangan kalsium mengakibatkan *osteoporosis* atau pengeroposan tulang, pada

anak-anak hal ini menyebabkan terhambatnya pertumbuhan tulang selama masa pertumbuhan (Dwidyaniti Wira 2022). Semua zat gizi tidak dapat terpenuhi secara menyeluruh tanpa makanan yang cukup, sehingga anak harus mendapatkan gizi melalui MP-ASI, ASI, atau susu formula. *Stunting* juga dapat disebabkan oleh buruknya kebersihan makanan karena malnutrisi dapat disebabkan oleh penyakit yang dapat dipicu oleh buruknya kebersihan makanan dan lingkungan. Kondisi yang dikenal sebagai *stunting* terjadi ketika tinggi dan berat badan balita tidak proporsional dengan tahap perkembangannya (Ruswandi, Ranifah, and Adawiah 2024).

Beberapa cara pencegahan dan penanggulangan *stunting* antara lain :

A. Persiapan dini sebelum menikah

Kepentingan anak di masa depan harus diperhatikan selama berlangsungnya perkawinan, selain kepentingan calon suami istri atau ayah dan ibu. Ketidakhadiran anak yang tidak berisiko sakit atau penyakit, seperti kelainan pertumbuhan, harus diperhatikan ketika menganalisis varian genetik. Dalam Konvensi Hak Anak, UNICEF menyatakan bahwa pasangan yang salah satu atau keduanya berusia di bawah delapan belas tahun melakukan pernikahan dini. Salah satu variabel yang berkontribusi terhadap terhambatnya pertumbuhan anak adalah usia ibu saat menikah (Restiana and Fadilah 2023).

Variabel keturunan mencakup 80% dari total, dengan hormon, malnutrisi, dan faktor ekonomi dan lingkungan yang mencakup proporsi yang tersisa, menurut

Stewart et al. Dari 1033 polimorfisme nukleotida tunggal (SNP) yang terkait dengan perawakan pendek di Taiwan, 13 ditemukan sensitif terhadap pengerdilan dan dipilih sebagai SNP potensial untuk kerentanan pengerdilan, menurut penelitian genetik yang diperoleh dari basis data GWAS (Lin et al., 2017). Penelitian Tiongkok lainnya menemukan PTPN11, gen yang terkait dengan tinggi badan rendah yang memengaruhi pengerdilan (Devi et al. 2024).

B. Penambahan suplementasi ibu hamil

Untuk meningkatkan metabolisme dan memaksimalkan pertumbuhan janin, ibu hamil harus mengonsumsi makanan yang cukup. Perkembangan janin akan terhambat di dalam rahim akibat asupan makanan yang tidak memadai (WHO, 2013). Oleh karena itu, *stunting* dapat dihindari dengan memberikan ibu hamil nutrisi, termasuk suplemen zat besi, asam folat, dan seng. Ibu hamil yang kekurangan gizi baik makro maupun mikronutrien memiliki cadangan gizi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisiologis janin. Hal ini dapat memengaruhi kemampuan intelektual dan bakat akademis jangka panjang, serta menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan yang buruk, peningkatan morbiditas, dan kematian (Lina 2023).

Ibu menyusui yang mengonsumsi suplemen dapat memproduksi lebih banyak ASI dan memiliki bayi dengan berat badan lebih. Hal ini sangat membantu ibu menyusui untuk memproduksi lebih banyak ASI. Berat badan bayi akan bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah ASI (Wasetyorini 2022)

C. Penambahan suplementasi mikronutrien untuk balita

Komposisi mikronutrien seperti seng dan zat besi sangat penting untuk fungsi imunologi. Sebagai elemen penting kedua yang paling umum dalam tubuh, seng diperlukan untuk perkembangan, diferensiasi, dan pembelahan sel serta 300 proses biologis lainnya (Astuti et al., 2019). Frekuensi makan rata-rata meningkat dari 4,16 menjadi 4,8 kali per hari ketika suplementasi seng digunakan. (Candra 2017).

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	(Afandi et al. 2023)	<i>Collaborative governance in a mandated setting : shifting collaboration in stunting interventions at local level</i>	<i>The qualitative research method</i>	Kerja sama wajib telah dilaksanakan, tetapi aktor non-negara belum banyak berpartisipasi. Hal ini disebabkan oleh belum sepenuhnya partisipasi pelaku non-negara dalam proses tersebut, yang sebagian besar masih dimiliki oleh lembaga pemerintah.
2	(Lino et al. 2024)	<i>Penta Helix Collaboration in Accelerating the</i>	<i>This study takes a qualitative</i>	Kepemilikan kartu JKN/KIS atau kartu Indonesia Sehat,

		<i>Reduction of Stunting Rates in East Nusa Tenggara, Indonesia</i>	<i>approach</i>	kesadaran pengasuhan anak, asupan gizi, dan isu sanitasi ditangani oleh pemerintah, komunitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media, akademisi, dan pelaku usaha. Namun, tahap perencanaan aksi kolaboratif mengungkap kesulitan dalam menerapkan kebijakan inovatif dengan baik karena orang-orang di sana mungkin menghadapi masalah kesehatan yang serius, termasuk meningkatnya kerentanan terhadap penyakit dan penurunan kesehatan secara umum.
3.	(Kurniasih, Suwitri, and ... 2023)	<i>Collaborative Governance</i> Dalam Percepatan Pencegahan <i>Stunting</i> di Kabupaten Temanggung	Deskriptif kualitatif	Menunjukkan betapa sukses dan efisiennya tata kelola kolaboratif dalam mempercepat pencegahan <i>stunting</i> , berdasarkan indikator teori Ansell dan Gash (2007) dan Emerson, Nabagci, dan Balogh (2011) yaitu, keadaan awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kerja sama. Menurut data sementara, terdapat penurunan angka <i>stunting</i> sebesar

				2,9% dan komitmen di antara anggota konvergensi dalam hasil penimbangan simultan pada Februari 2022.
4.	(Niga 2023)	<i>Collaborative Governance in an Effort to Reduce Stunting Rate in TTS District, NTT Province</i>	Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Belum ada pengambilan keputusan yang terpadu tentang <i>stunting</i> untuk menurunkan angka <i>stunting</i> . Dimensi administratif masih terbatas pada masalah integrasi basis data masing-masing indikator untuk masing-masing tujuan, yang belum komprehensif, valid, dan dapat dipercaya. Pada dimensi otonomi, ditemukan bahwa para pihak yang bekerja sama kurang memahami indikator angka <i>stunting</i> secara menyeluruh. Karena para pelaku tidak saling bergantung secara kelembagaan, maka faktor mutualitas tidak efektif.

5.	(Ilham, Achmad, and Amalia 2024)	<i>Collaborative Governance in Accelerating the Reduction of Stunting in Metro Cities Lampung Province</i>	<i>Qualitative</i>	Posisi pemerintah masih mendominasi tata kelola kolaboratif, sehingga peran masyarakat, pelaku sejarah, dan dunia usaha belum maksimal.
6.	(Pratama et al. 2024)	<i>Collaborative Governance Strategies To Accelerate Stunting Handling In Kampar District</i>	<i>Descriptive qualitative research</i>	Pendekatan tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, lembaga pendidikan, dan lembaga swadaya masyarakat berpotensi meningkatkan keberhasilan program percepatan penanggulangan <i>stunting</i> secara signifikan. Untuk mengatasi kendala yang ada dan mengembangkan solusi kreatif penanggulangan <i>stunting</i> jangka panjang, diperlukan koordinasi yang erat dan terorganisasi dengan melibatkan lintas sektor.
7.	(Ardianti and Afandi 2024)	<i>Collaborative Governance In Handling Stunting</i>	Metode deskriptif dengan pendekatan	Terbukti telah berhasil mengelola <i>stunting</i> secara efektif melalui tata kelola kolaboratif.

		<i>Problems At Bandung City</i>	n kualitatif	Hal ini dibuktikan dengan antusiasme warga untuk mengunjungi posyandu, sehingga angka kejadian <i>stunting</i> di Kota Bandung turun dari 26,4% menjadi 19,4% hanya dalam kurun waktu satu tahun (2021–2022) dengan target 14% pada tahun 2023.
8.	(Ramadhan and Ariani 2024)	<i>Collaborative Governance in Handling Stunting : Success Study in Gintungkerta Village, Karawang Regency</i>	<i>Qualitative research</i>	Khususnya terkait pendanaan dan fasilitasi, temuan studi menunjukkan bahwa kepemimpinan fasilitatif DPPKB masih di bawah standar. Integrasi sektor publik, swasta, dan masyarakat membuat desain kelembagaan menjadi lebih baik. Dalam jangka pendek, metode kolaboratif telah mengurangi angka <i>stunting</i> di Desa Gintungkerta dengan menumbuhkan saling pengertian, kepercayaan, dan komitmen melalui komunikasi tatap muka.
9.	(Permatasari and Walinegoro 2023)	<i>Collaborative Governance in Realizing Smart</i>	<i>Descriptive qualitative</i>	Berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor publik dan

		<i>Society as a Sustainable Stunting Reduction Effort in Sleman Regency</i>		<p>korporasi, akademisi, media, dan masyarakat, telah bekerja sama. Tiga komponen masyarakat cerdas interaksi masyarakat, ekosistem pembelajaran, dan sistem keamanan masyarakat telah diupayakan untuk diwujudkan melalui pemanfaatan kolaborasi. Namun, kendala yang dihadapi terkait dengan pergerakan pemangku kepentingan yang tidak terpadu, sehingga mengakibatkan tindakan yang tidak efisien dan tidak produktif.</p>
10	(Salsabila and Sadayi 2022)	<i>Collaborative Governance</i> dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo	Deskriptif kualitatif	<p>Baik aktor negara maupun non-negara terlibat dalam pelaksanaan CGR (<i>Collaborative Governance Regime</i>). Sementara pelaku non-negara meliputi masyarakat, LSM, dan sektor korporasi. Pelaku negara meliputi badan pemerintah pusat dan daerah. Untuk menciptakan kegiatan kooperatif, para pelaku dilibatkan secara aktif dan</p>

				interaktif untuk berkolaborasi saat melaksanakan CGR dalam program. Upaya kolaboratif mengarah pada pengembangan ketahanan sosial di masyarakat dengan memberdayakan individu untuk menjadi mandiri secara ekonomi.
--	--	--	--	---

Sumber : peneliti

Dalam penelitian (Afandi et al. 2023) dengan judul tata kelola kolaboratif dalam pengaturan yang diamanatkan : menggeser kolaborasi dalam intervensi *stunting* di tingkat lokal, menggunakan studi kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun keterlibatan dari aktor non-negara sangat minim, kemitraan wajib telah diberlakukan. Karena aktor non-negara tidak sepenuhnya terlibat dan lembaga pemerintah terus menjadi pemilik utama proses tersebut, skenario ini berkembang. Akibatnya, alih-alih menjadi proses yang dimiliki oleh semua orang, kerja sama dalam intervensi *stunting* direduksi menjadi program pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini menggunakan model tata kelola kolaboratif Ansell dan Gash untuk menyediakan kerangka kerja baru kerja sama yang diperlukan yang lebih inklusif, komunal, dan partisipatif. Laporan tersebut lebih lanjut menyarankan agar aktor non-negara didorong untuk bertanggung jawab atas tata kelola kolaboratif dan

agar masyarakat diberdayakan untuk membuat proses kolaboratif lebih setara dalam pengambilan keputusan.

Penelitian yang dilakukan (Lino et al. 2024) dengan judul Kolaborasi Penta Helix dalam Mempercepat Penurunan Angka *Stunting* di Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Teknik deskriptif digunakan dalam penelitian kualitatif ini. Berdasarkan temuan penelitian, meskipun pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), masyarakat, media, lembaga akademis, dan dunia usaha telah berupaya bersama-sama untuk mengatasi berbagai masalah seperti kepemilikan kartu JKN/KIS atau Kartu Indonesia Sehat Jaminan Kesehatan Nasional, kesadaran pola asuh, asupan gizi, dan sanitasi di Kabupaten Rote Barat Laut, namun pada tahap perencanaan aksi kolaboratif masih ditemukan kendala dalam penerapan kebijakan inovatif secara sukses. Angka *stunting* di Kabupaten Rote Ndao diperkirakan akan meningkat pada Februari 2023. Ada dampak kesehatan negatif dari *stunting* yang mungkin berlangsung lama. Karena *stunting* sangat umum terjadi di NTT, mungkin ada masalah kesehatan serius yang harus dihadapi masyarakat di daerah tersebut, termasuk meningkatnya kerentanan terhadap penyakit dan menurunnya kesejahteraan umum. Kekhawatiran tentang peningkatan angka *stunting* di Kabupaten Rote Ndao pada Februari 2023 bersifat teoritis dan tidak didukung oleh data. Sulit untuk membuat perkiraan akurat untuk masa mendatang tanpa pemeriksaan terperinci terhadap pola saat ini dan variabel yang memengaruhi tingkat *stunting*.

Menurut penelitian (Kurniasih et al. 2023) dengan judul *Collaborative Governance* Dalam Percepatan Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Temanggung, menggunakan metode deskriptif kualitatif. Ringkasan penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* Kabupaten Temanggung berjalan dengan efisien dan berhasil dalam mempercepat pencegahan *stunting*. Hal ini berdasarkan kajian peneliti terhadap indikator-indikator dari teori tengah Ansell dan Gash (2007) dan Emerson, Nabagci, dan Balogh (2011), yaitu *collaborative processes*, *beginning situation*, *institutions design*, dan *facilitative leadership*. Berdasarkan hasil pembobotan simultan pada bulan Februari 2022, angka *stunting* mengalami penurunan sebanyak 2,9% dan anggota konvergensi menunjukkan adanya rasa saling menghormati.

Penelitian (Niga 2023) dengan judul *Collaborative Governance* dalam Upaya Penurunan Angka *Stunting* di Kabupaten TTS, Provinsi NTT. Teknik penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yang dianalisa dengan menggunakan pendapat Thomson dan Perry (2006) menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam upaya penurunan angka *stunting* di Kabupaten TTS, Provinsi NTT belum terlaksana. (1) Pada dimensi *governance* ditemukan belum terlaksananya pengambilan keputusan bersama untuk menurunkan angka *stunting*; (2) pada dimensi administratif masih terbatas pada masalah integrasi basis data masing-masing indikator pada masing-masing tujuan yang belum lengkap, valid, dan reliabel; (3) pada dimensi otonomi ditemukan belum sepenuhnya pihak yang berkolaborasi memahami indikator angka *stunting*; (4) dimensi mutualitas belum efektif karena

secara kelembagaan para aktor belum saling mengandalkan; dan (5) proses pembentukan norma sosial menunjukkan belum adanya rasa saling percaya dan timbal balik dalam koordinasi penanggulangan *stunting* di Kabupaten TSS Provinsi NTT.

Berdasarkan penelitian (Ilham et al. 2024) dengan judul *Collaborative Governance* dalam Percepatan Penurunan Angka *Stunting* di Kota Metro Provinsi Lampung, menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* dalam percepatan penurunan angka *stunting* di Kota Metro Provinsi Lampung belum optimal terutama dalam proses kolaborasi. Peran masyarakat, akademisi, dan swasta belum sepenuhnya optimal karena peran pemerintah masih mendominasi dalam *collaborative governance* di Kota Metro. Penelitian ini merekomendasikan model *collaborative governance* yang ideal untuk percepatan penurunan angka *stunting* di Kota Metro Provinsi Lampung, berdasarkan model *collaborative governance* yang dimodifikasi oleh Ansell dan Gash yang disebut dengan Model Jama Pai (gotong royong). Model ini menekankan pada pendekatan kearifan lokal yang berfokus pada pemikiran logis "*continuum of care across the life cycle*" dengan pendekatan siklus hidup pada semua tahapan kolaborasi.

Riset yang dilakukan (Pratama et al. 2024) dengan judul Strategi Tata Kelola Kolaboratif untuk Mempercepat Penanganan *Stunting* di Kabupaten Kampar, menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa solusi tata kelola kolaboratif yang melibatkan sektor publik dan swasta, masyarakat,

lembaga pendidikan, dan lembaga swadaya masyarakat berpotensi meningkatkan efektivitas inisiatif Kabupaten Kampar yang bertujuan untuk mempercepat penurunan *stunting* secara signifikan. Penerapan model Penta Helix dan prinsip tata kelola kolaboratif mendorong sinergi antarsektor, yang memungkinkan integrasi sumber daya, informasi, dan pengalaman yang lebih dalam dan lebih luas. Strategi ini memaksimalkan alokasi sumber daya, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mengatasi kendala saat ini dan mengembangkan solusi kreatif untuk penurunan *stunting* jangka panjang, kemitraan antarsektor ini memerlukan koordinasi yang erat dan terorganisir. Oleh karena itu, model tata kelola kolaboratif telah terbukti menjadi metode yang penting dan berhasil untuk mengatur dan mengoordinasikan upaya penurunan *stunting* di Kabupaten Kampar, dengan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan masyarakat luas.

Penelitian (Ardianti and Afandi 2024) dengan judul *Collaborative Governance* dalam Penanganan Masalah *Stunting* di Kota Bandung, dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil artikel ini, pendekatan *collaborative governance* Kota Bandung dalam penanganan *stunting* sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan antusiasme masyarakat untuk datang ke posyandu, dan dalam kurun waktu satu tahun yaitu 2021-2022, kejadian *stunting* di Kota Bandung turun hingga 7%, dari 26,4% menjadi 19,4%.

Penelitian yang dilakukan (Ramadhan and Ariani 2024) dengan judul Tata Kelola Kolaboratif dalam Penanganan *Stunting* : Studi Keberhasilan di Desa Gintungkerta, Kabupaten Karawang, menggunakan metode penelitian kualitatif. Khususnya terkait pendanaan dan fasilitasi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan fasilitatif DPPKB masih kurang. Sektor pemerintah, bisnis, dan masyarakat semuanya terwakili dengan baik dalam desain kelembagaan. Dalam jangka pendek, metode kolaboratif telah mengurangi *stunting* di Desa Gintungkerta dengan menumbuhkan saling pengertian, kepercayaan, dan komitmen melalui komunikasi tatap muka.

Riset yang dilakukan (Permatasari and Walinegoro 2023) dengan judul *Collaborative Governance* dalam Mewujudkan *Smart Society* sebagai Upaya Penurunan *Stunting* yang Berkelanjutan di Kabupaten Sleman, menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat, akademisi, sektor komersial, pemerintah, dan media telah bekerja sama. Untuk mencapai tiga komponen masyarakat cerdas, yakni *community engagement*, *learning ekosistem*, dan *community security system*, diperlukan kolaborasi. Namun, gerakan pemangku kepentingan yang belum terintegrasi menjadi sumber kesulitan yang berujung pada tindakan yang tidak efisien dan efektif. Di Kabupaten Sleman, juga belum ada kanal digital engagement khusus *stunting*. Pemerintah Kabupaten Sleman telah berhasil menanggulangi *stunting* melalui kerja sama, berdasarkan hasil penelitian. Namun, untuk mencapai target zero *stunting*, pemerintah perlu melakukan sejumlah

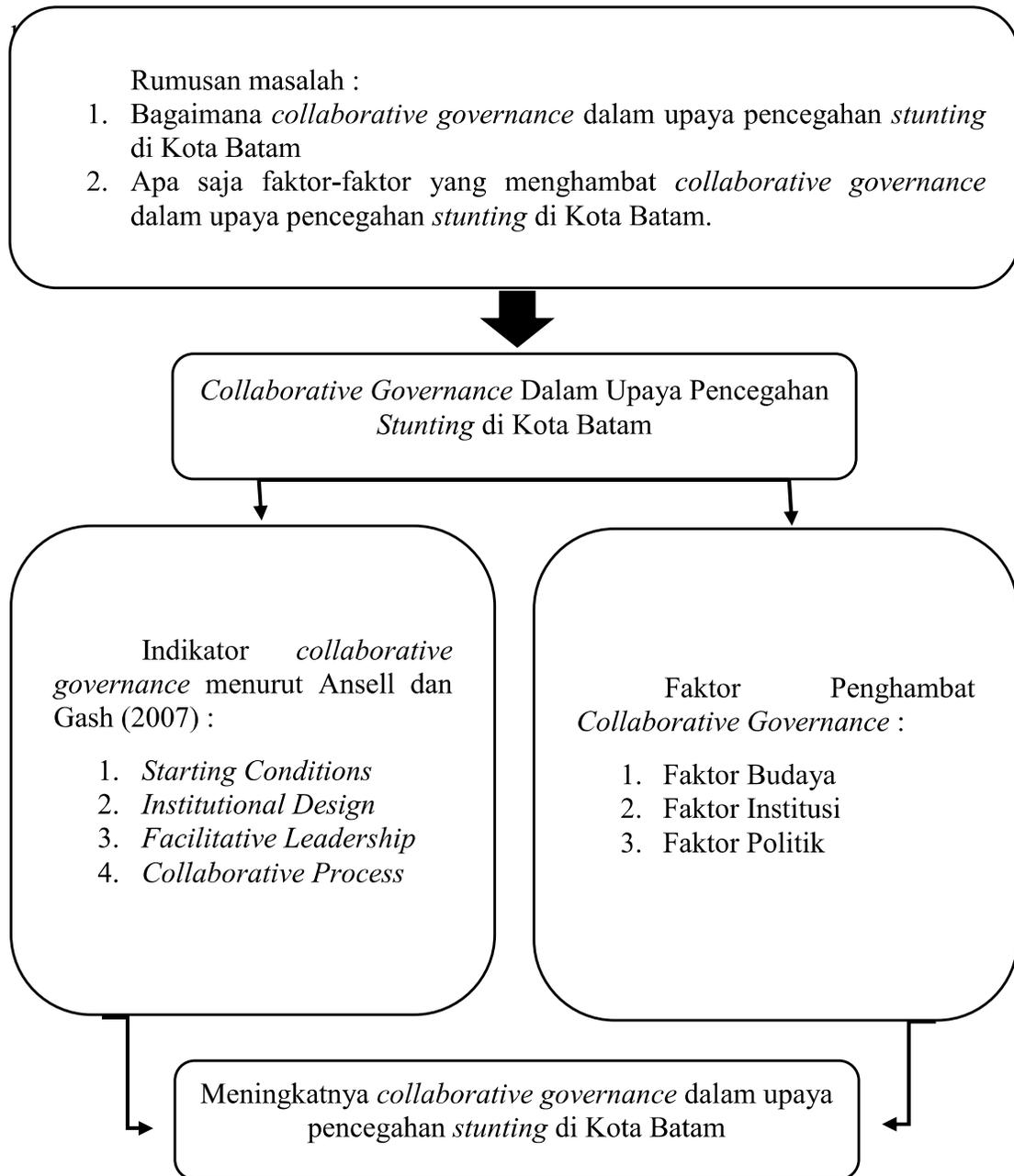
perubahan atau perbaikan, antara lain dengan mengkaji peran pemangku kepentingan, mengembangkan jejaring kerja sama, mengembangkan taktik pelaksanaan program, dan menciptakan kanal media interaksi unik seputar *stunting* di kabupaten tersebut.

Menurut penelitian (Salsabila and Sadayi 2022) dengan judul *Collaborative Governance* dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo, menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dalam melaksanakan inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, digunakanlah gagasan tata kelola kolaboratif. Paradigma pembangunan alternatif dengan menggunakan *Collaborative Governance Regime* (CGR) atau yang dikenal juga dengan prinsip tata kelola kolaboratif. Dalam pelaksanaan CGR, aktor negara dan non-negara terlibat. Pelaku negara meliputi instansi pemerintah pusat dan daerah, sedangkan aktor non-negara meliputi masyarakat, LSM, dan sektor komersial. Untuk mengembangkan kegiatan kolaboratif, para aktor yang terlibat terlibat dalam kolaborasi aktif dan interaktif saat melaksanakan CGR dalam program. Upaya kolaboratif bermuara pada pengembangan ketahanan sosial di masyarakat dengan memberdayakan individu untuk menjadi mandiri secara ekonomi.

2.5 Kerangka Berpikir

Pemahaman tentang hubungan antara suatu teori dan hal-hal yang dianggap penting dikenal sebagai kerangka berpikir. Berikut menggambarkan proses berpikir :

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir



Sumber : Peneliti